

Mimpi yang kamu impikan sendiri hanya akan jadi sebuah mimpi. Mimpi yang kamu impikan bersama orang lain akan jadi kenyataan.

Yoko Ono,
Seniman asal Jepang

EDISI RABU / 29 Januari 2020

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

SIRINE PEMBANGKANGAN KONSTITUSI

Sirine tanda bahaya terkait pembangkangan konstitusi mulai jelas terdengar. Mahkamah Konstitusi (MK) menyodorkan bukti, meski prosentase tingkat kepatuhan lebih tinggi, tapi ada 24 putusan yang diabaikan alias tidak dipatuhi. Tanda awal runtuhnya bangsa?

(Baca, Hal 11)

MAHKAMAH KONSTITUSI

JEJAK PENGABAIAN PUTUSAN MK

Kepatuhan Terkait Putusan MK (2013-2018)

- Total 109 putusan
- Sebanyak 24 putusan (22,01%) tidak dipatuhi
 - Sebanyak 59 putusan (54,12%) dipatuhi seluruhnya
 - Sebanyak 6 putusan (5,50%) dipatuhi sebagian
 - Sebanyak 20 putusan (18,34%) belum dapat diidentifikasi

Kinerja MK Tahun 2019

- Terdapat 122 perkara pengujian UU (85 perkara pada 2019 & 37 lainnya melanjutkan 2018)
- Ada 92 perkara yang telah

- diputus hingga Desember 2019
- Ada 30 perkara masih dilanjutkan pengujiannya hingga 2020

3 Besar Aturan yang paling sering diuji :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebanyak 18 kali
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sebanyak 9 kali
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali

Sumber: Fakultas Hukum Trisakti & MK



RAIH PREDIKAT A SAKIP 6 KALI, INI JURUS PEMPROV JATIM

Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali menerima penghargaan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 dengan predikat A dan angka 81,71. Luar biasanya, ini menjadi kali ke-6 secara berturut-turut bagi Jatim mencetak prestasi serupa sejak 2014.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak pun membeberkan beberapa hal yang membuat Jatim kembali memperoleh dan mempertahankan predikat A. Pertama, adalah memperkuat peran Pemprov Jatim dalam kaitan dengan kabupaten atau kota.

Kedua, konsistensi dari visi misi dan kegiatan, serta bagaimana melakukan penyelarasan organisasi yang mampu mencerminkan strategi. "Sebagai contoh kami, memperkuat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sebagai upaya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat," kata Emil dikutip, Selasa (28/1).

Ketiga, Pemprov Jatim melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) selaku evaluator SAKIP. Terutama, terkait dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disahkan 13 Agustus 2019.

Kemudian, lanjut Emil, melakukan penataan kelembagaan yang berbasis kinerja dengan menjadikan RPJMD sebagai pedoman. Penataan kelembagaan lalu dilanjutkan dengan melakukan evaluasi kelembagaan dengan berdasarkan Proses Bisnis Pencapaian Tujuan atau sasaran baik OPD maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Emil menjelaskan apa yang dilakukan Pemprov Jatim tersebut adalah wujud dari komitmen Pemprov Jatim untuk mempersiapkan secara khusus bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hal itu pun sebagaimana arahan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap tahun 2020 Pemprov Jatim diharapkan bisa memperoleh predikat SAKIP AA.

Untuk diketahuoi, penghargaan diberikan dalam Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II di Inaya Putri Bali Kawasan Wisata Nusa Dua Badung, Bali, Senin (27/1). Pada kesempatan ini, Emil hadir mewakili Khofifah untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB M. Yusuf Ateh.

Pada 2014, Jatim memperoleh nilai 75,20 (predikat A), tahun 2015 dengan nilai 80,04 (predikat A), tahun 2016 memperoleh nilai 81,14 (predikat A), tahun 2017 mendapat nilai 81,21 (predikat A), tahun 2018 mendapat 81,70 (predikat A), dan Tahun 2019 mendapat 81,71 (predikat A). (sur,ins)



PENGHARGAAN SAKIP DI JATIM

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|-------------|------------|
| Predikat A | Pemprov Jatim | Banyuwangi | Lamongan | Gresik | Ngawi | Sidoarjo | Situbondo |
| Predikat BB | Malang | Kota Malang | Mojokerto | Madiun | Kota Madiun | Kota Blitar | Trenggalek |
| | Kota Probolinggo | Probolinggo | Pasuruan | Ponorogo | Kota Kediri | Tulungagung | Bondowoso. |
| Predikat B | Sumenep | Sampang | Pamekasan | Blitar | Pacitan | Kota Batu | Tuban |
| | Kota Pasuruan | Magetan | Kota Mojokerto | Kediri | Lumajang | Nganjuk | Bojonegoro |
| | Bangkalan | Jember | Kota Madiun | Surabaya | | | |

DISHUB UJI COBA TL DI SIMPANG PANDEGILING - IMAM BONJOL



Irvan Wahyudrajat
Kepala Dishub Kota Surabaya

Surabaya- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya baru saja uji coba operasional Traffic Light (TL) yang terpasang di Jl. Pandegiling - Jl. Imam Bonjol. Langkah ini sebagai upaya mengatasi kemacetan yang kerap terjadi pada jam-jam sibuk.

Di samping itu, Traffic Light pada

persimpangan ini juga berfungsi sebagai opsi jalan bagi masyarakat dari arah barat yang akan mengarah ke timur. Sebab sebelumnya hanya bertumpu pada Jl. Dr. Soetomo dan Jl. Polisi Istimewa.

Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan, berdasarkan kajian dan analisis lalu lintas yang telah dilakukan, akan diterapkan dengan 3 fase di simpang Jl. Pandegiling dan Jl. Imam Bonjol. "Kita juga telah melakukan penyesuaian marka jalan di sekitar persimpangan dan penambahan 3 kamera Face Recognition pada titik lokasi Pandegiling - Teuku Umar dan Pandegiling - Samratulangi," kata Irvan, Selasa (28/1).

Menurutnya, penambahan fasilitas perlengkapan jalan di lokasi itu, sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan. Seperti kendaraan yang melawan arus dan parkir di atas pedestrian. Untuk

memperlancar lalu lintas di simpang ini, Dishub juga berkoordinasi dengan instansi terkait. "Ial ini bertujuan untuk mengurangi hambatan samping yang ada di sekitar simpang," ujarnya.

Beberapa usaha yang dilakukan untuk memperlancar lalu lintas di simpang ini diantaranya, relokasi Lahan Pembuangan Sampah (LPS) yang berada di sudut sisi timur Jl. Pandegiling oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) serta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).

Selain itu, Irvan menyebut, pembangunan jalur pejalan kaki atau pedestrian, juga dilakukan Dinas PU Bina Marga dan Pematuan (DPUBMP). "Sedangkan untuk penataan PKL yang berada di sekitaran simpang, dilakukan oleh Satpol PP bersama Linmas," pungkasnya. (ard)

BELUM ADA PERWALI, DANA KELURAHAN BELUM BISA DIMANFAATKAN

Surabaya- Anggaran dana untuk kelurahan senilai Rp 3,5 sampai Rp 4 miliar belum bisa dimanfaatkan akibat belum ada Peraturan Walikota (Perwali). Untuk itu, DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar segera membuat Perwali yang membahas tentang kucuran dana kelurahan.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna menyampaikan bahwa jika persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi. "Ya, saat ini memang belum ada Perwali untuk dana kelurahan karena itu kami mendorong adanya perwali, sehingga perlu juga menyiapkan SDM agar bisa memanfaatkan dana kelurahan tersebut," kata Ayu, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya, besaran dana kelurahan diperoleh dari lima persen dari total APBD Kota Surabaya. Nantinya 152 kelurahan di Surabaya yang menerima kucuran dana, masing-masing kelurahan berhak atas penggunaan dana Rp 3,5 sampai Rp 4 miliar.

Rencananya, Lanjut Ayu, dana yang telah disediakan langsung ditransfer ke rekening milik kelurahan. Akan, tetapi dana yang sudah di-

kururkan harus mendapat pengawasan dari Camat dan Lurah terkait pemanfaatannya, terutama yang turun ke RT dan RW.

"Kami berharap tidak ada lagi penarikan-penarikan yang dilakukan oleh RT atau RW yang terjadi beberapa hari yang lalu, Camat dan Lurah bertanggungjawab untuk mengawasi penggunaan dana, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dana tersebut," harapnya.

Dana tersebut, lanjut Ayu, dapat di manfaatkan untuk belanja barang maupun jasa, termasuk infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana lainnya. Bahkan bisa juga untuk program pendidikan dan pengembangan wisata kampung.

Ayu menjelaskan terdapat kendala yang dihadapi, yakni pihak Kelurahan hingga saat ini belum banyak yang memaksimalkan penggunaan dana tersebut. "Masak dana kelurahan melimpah tidak berani memanfaatkannya, kalau perlu nanti harus ada tenaga pendamping agar dana yang sangat besar ini bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Diwaktu yang sama, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba mengatakan jika dikumpulkannya Lurah se Surabaya guna memberikan dan meluruskan pemahaman



Pertiwi Ayu Krishna
Ketua Komisi A DPRD Surabaya,

soal dana Kelurahan. "Tadi Komisi A memanggil seluruh Lurah se Surabaya. Hal itu untuk memberikan pemahaman yang benar soal dana Kelurahan," katanya.

Dia mengingatkan, jangan sampai pemahaman mereka keliru soal dana kelurahan, dana itu digelontorkan oleh dan dari pusat untuk mempercepat pembangunan ditingkat RT/RW dan Kelurahan. "Artinya biar pembangunan tidak tersentralistis namun merata. Ya begitu kira-kira to tujuannya," pungkasnya. (ard)

DEWAN DUGA PEMBANGUNAN TOL SEBABKAN BANJIR

Surabaya - Pembangunan jalan tol baik yang melintasi kawasan Gresik maupun Mojokerto diduga mengakibatkan kerawanan banjir. Hal ini disebabkan pembangunan tiang pancang yang mengakibatkan kondisi lingkungan sekitar.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Samwil mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol tidak hanya tol trans Jawa yang sudah jadi atau yang masih dalam tahap pengerjaan, seperti tol Bunder-Legundi. Kerawanan akibat Pembangunan jalan tol ini diketahui Komisi D saat melakukan sidak untuk melihat progres pembangunan tol Bunder-Legundi. Komisi D melihat ada tiang pancang dipasang di tengah sungai.

"Berdasarkan temuan di lapangan, selain memasang tiang pancang di dalam sungai, pihak kontraktor pembangunan jalan tol juga mengubah aliran air di Kali Lamong," katanya, Selasa (28/1/2020).

Samwil menilai kondisi tersebut jelas sangat

membahayakan karena setiap musim hujan debit aliran Kali Lamong cenderung tinggi dan bisa mengakibatkan banjir. Samwil mengatakan dampaknya sekarang sudah terjadi banjir dan pemasangan tiang pancang itu bisa menjadi saah satu penyebab.

"Dalam waktu dekat kami (Komisi D DPRD Jatim) dalam waktu dekat akan memanggil pihak Jasa Marga selaku penanggung jawab pembangunan ruas tol Bunder-Legundi," kata politisi Partai Demokrat ini.

Hal serupa juga dikatakan Hidayat. Dia juga menduga banjir di kawasan Mojokerto juga akibat pembangunan tiang pancang Tol trans Jawa yang tidak memperhatikan lingkungan. Dia menandakan bahwa ada empat desa di kecamatan Jetis, Mojokerto mengalami banjir. Padahal sebelum ada tiang pancang jalan tol empat desa itu tidak pernah banjir.

"Sejauh ini belum ada penanganan yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi dan BPTJ (Balai Pengelola Jalan Tol) terkait banjir



Samwil,
Anggota Komisi D DPRD Jatim

dikawasan tersebut. Kami juga akan meminta pemerintah provinsi atau BPTJ segera melakukan langkah-langkah kongkrit agar banjir di kawasan Jetis bisa segera ditangani," pinta politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Hidayat, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan normalisasi sungai yang ada di sekitar kawasan tersebut. Selain itu juga dengan pengadaan pompa air guna menyedot air yang ada di kawasan tersebut, tidak sampai menggenang hingga sehari-hari. "Kalau sudah merugikan masyarakat, ya harus dicarikan solusi biar pembangunan jalan tol tidak menimbulkan persoalan baru," pungkas Hidayat. (ufi)

PENCEMARAN KALI GENJONG

POLRES BLITAR PANGGIL DUA PEGAWAI PT GREENFIELDS

Blitar- Proses penyelidikan terhadap dugaan pencemaran Kali Genjong yang dilakukan PT Greenfields terus bergulir, bahkan Polres Blitar telah memanggil dua pegawainya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Blitar, AKBP Budi Hermanto jika pihaknya melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi dan laporan dari masyarakat pada 10 Januari 2020 lalu, mengenai dugaan pencemaran limbah di Kali Genjong. "Kasat Reskrim membentuk tim, bersama intel turun ke lokasi," tutur AKBP Buher panggilan AKBP Budi Hermanto, Selasa (28/1/2020).

Hasil awal dari penyelidikan ini ditemukan jika turun hujan besar (deras), kotoran dari peternakan sapi mengalir ke Kali Genjong yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk pertanian dan kebutuhan lainnya.

"Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait dengan pencemaran, juga berkoordinasi dengan Pemkab Blitar dalam perkara ini," ungkap AKBP Buher.

Ditegaskan AKBP Buher jika prosesnya

tidak semata-mata dari hasil penyidikan saja, tapi dalam penyelidikan ini juga menggugah kepedulian investor yakni perusahaan besar. "Agar lebih peduli terhadap lingkungan, bersama dengan stakeholder terkait seperti Pemkab, DLH dan Pemprov untuk menyelesaikan kasus ini," tegasnya.

Intinya polisi tidak mau dikatakan mengganggu investasi, tapi harus sesuai dengan prosedur, aturan serta sistem yang baik.

Disinggung mengenai indikasi tindak pidana lingkungan, AKBP Buher mengaku masih diselidiki. Jika memang terbukti, yang diperkuat dengan hasil lab mengenai sample limbah. "Pelaku akan dijerat dengan pasal 104 juncto pasal 60 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar," paparnya.

Apakah sudah ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam kasus ini, AKBP Buher mengaku masih diselidiki bersama DLH terkait AMDAL.

Sementara yang dari pihak PT Greenfields juga sudah dipanggil 2 orang pegawainya,



untuk diminta keterangan pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya warga di sekitar Kali Genjong Desa Suruh Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, mengeluhkan pencemaran yang mengakibatkan air sungai berwarna cokelat kehitaman, berbau kotoran sapi dan berbulu. Bahkan dampak dari pencemaran limbah kotoran ternak ini, dipastikan oleh DLH Kabupaten Blitar berasal dari rembesan atau luapan limbah kotoran sapi peternakan sapi perah PT Greenfields. Mengakibatkan banyak ikan yang mati, serta air sungai tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu pihak PT Greenfields melalui Humas, Nanang ketika dikonfirmasi melalui whatsapp menjawab bukan kapasitasnya memberikan keterangan. Ketika ditanya harus menghubungi siapa jika ingin konfirmasi, hanya dijawab dengan emoji. (ais)

SATU MAHASISWA ASAL LAMONGAN DIKARANTINA DI WUHAN

Lamongan - Salah satu mahasiswa asal Lamongan yang tengah menempuh pendidikan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dikabarkan di karantina pihak setempat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memantau perkembangan mahasiswa bernama Premasti Ardita Cahyani, 23, asal Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dia merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang mendapatkan beasiswa untuk menempuh studi Bahasa Mandarin di Kota Wuhan.

Sekda Kabupaten Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan kalau pihaknya kasih terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di China. "Bersama rektor Unesa kita sudah koordinasi dengan KBRI di China," katanya saat dikonfirmasi lentera-today.com,



Selasa (28/1/2020).

Dia menandakan bahwa pihaknya juga terus menkoordinasikan semua langkah langkah yang harus dilakukan dengan KBRI di China. Termasuk dengan pemantauan kondisi kesehatan mahasiswa yang akrab dengan panggilan Memes tersebut. "Sementara ini (kondisi Memes) baik baik saja," kata Yuhronur.

Sementara itu, Orang tua dari Pramesti Ardita Cahyani, Elly mengatakankalau putrinya belajar di Central China Normal University (CCNU)

Kota Wuhan. Dia menjelaskan kalau anaknya itu mendapat beasiswa belajar Bahasa Mandarin di China sejak enam bulan lalu. Di Unesa, lanjutnya, Memes juga menempuh jurusan Bahasa Mandarin

Mendengar kondisi anaknya, Elly mengakui sangat cemas. Terlebih lagi saat ini Kota Wuhan sedang dikarantina secara massal untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. "Namanya ibu, pasti khawatir," katanya. (ufi)

PILWALI PASURUAN

GOLKAR VS PDIP MEMANAS, 'TUTUP PINTU' UNTUK TENO

Pasuruan - Perseteruan antara Partai Golkar dan PDIP Kota Pasuruan kian memanas. Partai Golkar menutup pintu rapat-rapat bagi Ketua DPC PDIP Pasuruan Raharto Teno Prasetyo untuk mengikuti penjurangan Bakal Calon Walikota.

Padahal, kedua partai bersekutu pada Pilwali 2015 lalu. Hubungan harmonis itu merenggang sejak Teno yang menjabat Wakil Walikota Pasuruan menggantikan posisi Walikota Sriyono yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Partai Golkar bahkan menjadi oposisi dalam setiap kebijakan Plt Walikota Teno.

Anggota Tim Pilkada Partai Golkar, Arief Ilham, menyebut, proses penjurangan Cawali telah berakhir meski hanya diikuti empat orang dari unsur eksternal. Mereka adalah Ismail Nachu, Ayik Suhaya, Yuli Andriyani dan Anshori.

"Penjurangan Cawali Partai Golkar memang tidak kami lakukan secara terbuka. Proses penjurangan sudah selesai dilakukan," kata Arief Ilham dikutip, Selasa (28/1).

Pihaknya mengaku tidak pernah menolak keinginan Teno mengikuti proses politik tersebut. Hanya saja, tim PDIP yang bermaksud mendaftarkan Teno sudah melebihi batas waktu



Teno saat kampanye Pilwali 2015 lalu.

yang ditetapkan.

"Ada pimpinan PDIP yang mau mengambilkan berkas pendaftaran untuk Teno, tapi sudah terlambat. Kami memang tidak pernah mengumumkan batas waktu proses penjurangan itu. Saat ini penjurangan dilakukan dari internal Partai Golkar," tandas Arief Ilham.

Sementara itu, Raharto Teno Prasetyo mengakui jika ia tidak bisa mendaftarkan diri dalam penjurangan Cawali Partai Golkar. Ia tidak mengetahui jika penjurangan Partai Golkar tersebut sudah ditutup. "Wis (sudah) ditutup," kata Teno menjawab wartawan terkait penjurangan Cawali Partai Golkar. (ocn)

APOLITIS, TAK JAMIN KOALISI 'GEMUK' MENANGI PILKADA

Kecangganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia menjadi suatu masalah yang harus mulai diperhatikan. Tersangkutnya deretan nama Kepala Daerah, menjadikan Pilkada serentak 2020 diprediksi kurang bergairah. Walhasil, meski calon telah mendapatkan dukungan dari banyak partai, belum tentu menjamin kemenangannya.

Pakar komunikasi politik asal Unair, Suko Widodo mengungkapkan saat ini memang banyak koalisi 'gemuk'. Termasuk dalam Pilwali Surabaya. Tapi hal ini belum tentu ampuh untuk memenangkan pilihan masyarakat. Menurutnya, hal itu didasari beberapa alasan secara khusus.

"Bukan hanya di Surabaya saya rasa, melainkan di banyak daerah juga, masyarakat sedang mengalami kondisi apolitis. Salah satunya dipicu banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi," ujar Suko Widodo,

Selasa (28/1). Sikap apatis terhadap politik menjadikannya apolitis terhadap masalah perpolitikan. Apatis yang artinya tidak peduli dan apolitis artinya tidak berminat pada politik.

"Ini saya rasa menjadi tantangan bagi mereka. Termasuk soal bagi-bagi kue di koalisi gemuk," tambah pria yang akrab disapa SW itu.

Soliditas antar partai dan internal masing-masing pun, menurut Suko bakal menjadi tantangan serius tersendiri. "Bagaimana mengkondisikan semua lini solid hingga level akar rumput. Itu perlu dipikirkan formulasinya," katanya.

"Pola komunikasi lah intinya. Kalau itu bisa dikondisikan dengan tepat, maka koalisi gemuk ini bisa menjadi kekuatan tersendiri. Mereka bisa benar-benar memenangkan ceruk di semua lini. Hingga akar rumput," pungkas Suko.

Sebagai informasi, jelang Pilwali Surabaya telah terbentuk satu koalisi besar beranggotakan



Suko Widodo, Pakar komunikasi politik asal Unair

5 partai. Dideklarasikan pekan lalu, PKB-Gerindra-Demokrat-PAN-PPP telah sepakat mengusung mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya.

Koalisi itu pun hingga kini masih membuka peluang partai-partai lain yang belum menentukan sikap, seperti Golkar dan PKS serta PSI untuk bergabung. Meskipun demikian, mereka pun belum menunjuk satu nama yang diajukan sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota pendamping Machfud. (ins,bjt)

**SHINJIRO KOIZUMI**

MEMBAWA ANGIN BARU DI JEPANG

Cuti karena melahirkan anak merupakan hak perempuan pekerja. Tetapi, jika seorang ayah mengajukan cuti untuk mengasuh anak yang baru dilahirkan oleh istri merupakan peristiwa baru.

Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koizumi memulai fenomena itu setelah kelahiran anak pertamanya. Ini merupakan hal langka di Jepang.

Dikutip dari Reuters beberapa waktu lalu (Jumat, 17/1/2020), Shinjiro mengumumkan kelahiran anak pertama di Tokyo. Sebagai ayah dari anak lelakinya itu Shinjiro memutuskan mengambil cuti selama dua minggu.

“Sebagai seorang ayah, saya sangat senang karena anak saya lahir sehat dengan selamat,” kata Shinjiro dalam sebuah konferensi pers.

Dia mengatakan, istrinya adalah mantan penyiar berita televisi. Christel Takigawa, melahirkan pada hari Kamis (16/1/2020). Shinjiro Koizumi merupakan anak mantan Perdana

“Saya menyadari masih ada perbedaan pendapat. Saya akan menyisihkan waktu buat keluarga saya, sambil memastikan untuk memprioritaskan tugas publik. Saya siap untuk keadaan darurat apa pun,”



Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi.

“Cuti saya sudah dimulai” kata Shinjiro. Ia meninggalkan kantornya pada Kamis pagi, agar bisa menunggu persalinan istrinya di malam hari.

Shinjiro dipandang sebagai pemimpin masa depan Jepang. Dia mengambil hak cutinya karena dia ingin apa yang dilakukannya itu menjadi panutan bagi para ayah.

Pemerintah Jepang memiliki kebijakan cuti bagi orang tua yang anaknya baru dilahirkan. Cuti ini memungkinkan laki-laki dan perempuan pekerja di Jepang untuk mengurus anaknya.

Mereka tetap memperoleh sebagian dari gaji \PM Shinzo Abe mendorong agar lebih banyak laki-laki di Jepang mengambil cuti ayah. Cuti ini baik bagi perusahaan karena memungkinkan keseimbangan kehidupan kerja. Kebijakan tersebut memberi waktu luang lebih banyak bagi para ibu.

Ada yang menilai, langkah Shinjiro kemungkinan hanya berusaha mendapatkan perhatian. Shinjiro juga dikritik beberapa anggota parlemen Jepang. Sebaliknya sejumlah kalangan menyambut baik keputusan Shinjiro. Ia dinilai awal dari perubahan.

Menanggapi kritikan atas langkahnya, Shinjiro meyakinka, dia akan mengambil cuti secara fleksibel. Cuti ayah yang diambilnya dipastikan tidak memengaruhi kementerian yang dipimpinnya.

“Saya menyadari masih ada perbedaan pendapat. Saya akan menyisihkan waktu buat keluarga saya, sambil memastikan untuk memprioritaskan tugas publik. Saya siap untuk keadaan darurat apa pun,” kata Shinjiro (Ist).

SHINJIRO KOIZUMI
MENTERI LINGKUNGAN
JEPANG

JANGAN BUANG BIJI PEPAYA,

Berikut ini Manfaatnya



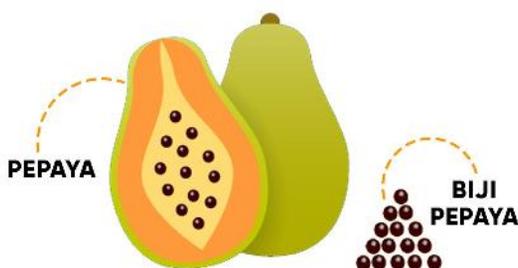
Anda suka mengonsumsi buah pepaya? Buah yang banyak ditemui di Indonesia ini dikenal memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, lo.

Pepaya mengandung serat, kalsium, fosfor, zat besi, papain, niasin, dan vitamin. Semuanya sangat baik untuk usus dan sistem kekebalan tubuh kita.

Pepaya aslinya berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Hingga akhirnya buah tropis ini pun menjadi populer di seluruh dunia.

Namun, selama ini kita hanya memakan daging buahnya saja. Padahal, ternyata bijinya juga memiliki berbagai manfaat.

**Apa saja manfaat biji pepaya?
Silakan simak!**

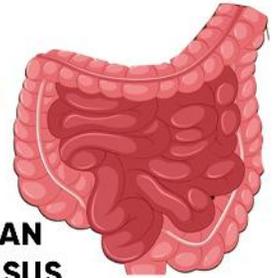


MELINDUNGI GINJAL

Mengonsumsi biji pepaya membantu mencegah kita dari gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kondisi ginjal kita yang kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan.

Tidak hanya mencegah, biji pepaya juga sangat baik dalam membantu meringankan sakit akibat gagal ginjal.

Caranya adalah dengan mengunyah 7 biji pepaya setiap hari. Jangan lupa juga barengi dengan minum air putih yang cukup serta pola hidup yang sehat.



MENINGKATKAN KESEHATAN USUS

Biji pepaya dapat meningkatkan kesehatan usus, karena mengandung enzim anti parasit yang tinggi. Biji pepaya menyingkirkan cacing dan parasit.

Caranya adalah dengan mengeringkan dan menggiling biji pepaya. Kemudian encerkan 1 sendok bubuk biji pepaya ini ke dalam segelas air, lalu rebus.

Kita juga bisa menambahkan madu dan mengonsumsinya 2 sampai 3 kali dalam sehari.



MEMBERSIHKAN HATI

Hati merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh kita. Sebab tugasnya adalah menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh.

Salah satu bahan alami yang dapat membuat hati tetap sehat adalah biji pepaya. Biji pepaya juga dapat meringankan sirosis, yaitu penyakit kronis pada hati.

Caranya, giling 5 biji pepaya. Kemudian campurkan dengan satu sendok air lemon. Minum ramuan ini dua kali sehari selama sebulan.



MELINDUNG SISTEM PENCERNAAN

Biji pepaya memiliki sifat anti bakteri dan anti inflamasi yang dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa biji pepaya ampuh melawan bakteri Salmonella dan Staphylococcus.

Caranya adalah dengan mengonsumsi 7 biji pepaya dalam sehari (1st).

BENARKAH SERING PINDAH GIGI MOBIL MATIK SAAT BERHENTI, **BISA RUSAK?**



Ada video yang sedang viral tentang transmisi matik mobil ditahan di D saat berhenti atau macet. Dalam video tersebut menekankan bahwa sering berpindah dari D ke N atau sebaliknya saat berhenti membuat transmisi matik bisa cepat jebol.

"Saat mobil berhenti, komponen clutch di dalam gearbox transmisi juga akan berhenti bergerak meskipun posisi tuas sedang di D," buka Hermas Efendi Prabowo, pemilik sebuah bengkel spesialis matik.

Komponen clutch yang terhubung dengan as roda penggerak pada dasarnya mendapat penyaluran tenaga dari input shaft di dalam torque convertor.

Sedangkan input shaft bergerak menggunakan putaran turbin yang mendapatkan tenaga dari tekanan oli berasal dari putaran impeller.



"Kalau turbin-nya berhenti, otomatis penyaluran tenaga dari tekanan oli terputus di antara impeller dan turbin," jelas Hermas.

Terputusnya penyaluran tenaga inilah yang membuat kerja transmisi juga ikut berhenti, meskipun tuas sering dipindahkan di posisi D atau N dalam kondisi berhenti.

Namun seringkali dari posisi N saat pindah ke D akan terasa gejala hentakan atau stall yang banyak dikhawatirkan jika sering terjadi

akan membuat transmisi matik cepat jebol.

Hal tersebut terjadi karena komponen clutch yang belum siap berjalan, tetapi putaran mesin sudah lebih dulu tinggi yang menghasilkan tekanan oli ke transmisi lebih besar.

"Itu juga hanya sepersekian detik, clutch yang bergesekan basah ketemu basah, tidak akan bikin jebol juga karena tidak berpengaruh signifikan," tegas Hermas (Ist).

MASKER BERAS SEHATKAN WAJAH, INI CARA BUATNYA!



Stigma perempuan cantik itu yang berkulit putih sudah layak ditinggalkan. Setiap kaum hawa punya keunikannya masing-masing. Kesehatan wajah lah yang tama. Nah ternyata masker beras buatan sendiri bisa dijadikan senjata ampuh merawat kulit. Ini caranya!

Memakai masker ukan soal menjadi cantik, tapi juga membuat kulit lebih bersih. Istilah masker beras bermula dari air beras yang telah digunakan 1.000 tahun silam di Jepang. Kian kemari, popularitas masker beras kian meningkat.

Tak hanya dapat memperbaiki kondisi kulit, tapi juga mudah dibuat sendiri di rumah. Sebelum mengetahui cara membuat masker beras, kita kenali dulu beberapa manfaat masker beras untuk kulit. Namun perlu diingat, beberapa manfaat ini belum semua teruji secara ilmiah. Mencegah penuaan. Dalam sebuah penelitian terhadap 12 relawan yang menggunakan formulasi masker beras selama 28 hari, ditemukan bahwa tingginya kandungan antioksidan di dalamnya dapat menghambat aktivitas elastase. Ini adalah enzim yang dapat merusak elastin. Artinya, menggunakan masker beras atau air beras dapat mempertahankan elastisitas kulit.

Tak hanya itu, tanda-tanda penuaan juga dapat dicegah. Mencerahkan kulit Keunggulan masker beras yang satu ini adalah yang paling populer, yaitu mencerahkan kulit. Meski demikian, belum

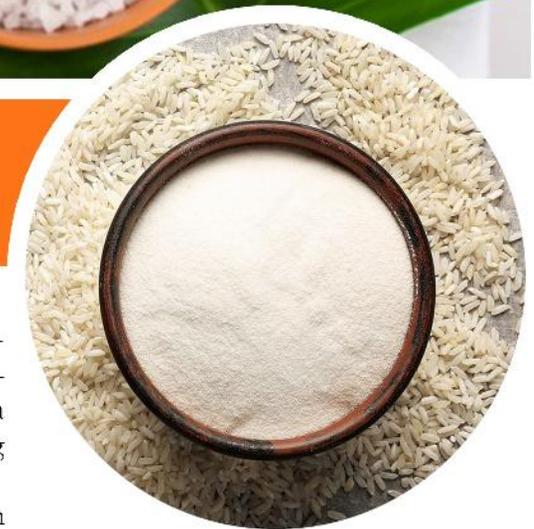
ada uji ilmiah yang mendukung hal ini.

Orang-orang di Korea dan Jepang menggunakan air beras atau masker beras untuk mencerahkan kulit wajah. Bisa jadi itu pula sebabnya banyak produk perawatan kulit yang mengandung sari pati air beras sebagai kandungannya.

Meredakan kulit terbakar. Bagi yang merasakan kulit terbakar karena terlalu lama berada di bawah matahari misalnya, masker beras bisa jadi pilihan untuk menenangkan kulit. Tak hanya itu, air beras juga bisa mengencangkan kulit dan cocok bagi mereka yang memiliki jenis kulit berminyak.

Cara membuat masker beras di rumah, ada beberapa pilihan. Cara membuat masker beras di rumah yang pertama adalah yang paling cepat, yaitu dengan merendam beras. Siapkan 100 gram beras dan cuci bersih. Tuangkan air 500-700 ml ke dalam baskom. Rendam beras selama 30 menit. Sharing beras dan pisahkan airnya dalam gelas. Simpan di lemari pendingin.

Masker beras yang dibuat dengan metode rendaman ini bisa bertahan di lemari pendingin selama satu minggu. Masker beras ini bisa diaplikasikan pada kulit dan juga rambut.



Cara membuat masker beras berikutnya adalah dengan metode fermentasi. Menurut penelitian, jenis masker beras yang satu ini juga dapat mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV dan mencegah penuaan. Cuci bersih 100 gram beras. Tuangkan air 500-700 ml ke dalam baskom. Rendam beras selama 2 hari untuk memasuki proses fermentasi. Setelah 2 hari, aduk rata air dan saring airnya. Simpan air di lemari pendingin.

Ketiga, cara membuat masker beras di rumah adalah dengan merebusnya. Rebus beras (seperti saat akan menanak nasi). Sharing air rebusannya. Simpan air rebusan dalam botol. Biarkan dingin dan simpan di lemari es. Untuk menggunakannya, kamu bisa meletakkannya di botol spray dan menjadikannya toner setelah mencuci muka. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan kapas untuk mengaplikasikan masker beras ke wajah. Jadi kamu pilih yang mana?(ins,ist)

MK yang merupakan penjaga konstitusi mulai menunjukkan keresahannya. Dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diungkapkan dari hasil penelitian, terdapat 24 dari 109 putusan MK pada 2013-2018 atau sebanyak 22,01% tidak dipatuhi oleh pemerintah. Lembaga yang dijuluki sebagai 'The Guardian of State Ideology and Democracy' ini pun mesinyalir pembangkangan konstitusi yang bisa mengarah ke awal runtuhnya bangsa.

"Menutup bagian aspek peradilan, penting bagi saya untuk mengutip sesuatu hal yang mungkin agak merisaukan kita," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno laporan MK tahun 2019 yang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1). "Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Betapapun konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam bernegara, ia tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak ditegakkan dan ditaati," lanjutnya.

Dijelaskannya, merujuk pada hasil penelitian yang ditulis oleh tiga dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2019 dengan judul "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan".

"Temuannya mayoritas dipatuhi seluruhnya, yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %, sebanyak 6 atau 5,50% dipatuhi sebagian, sebanyak 24 atau 22,01% tidak dipatuhi, sisanya 20 putusan atau 18,34% belum dapat diidentifikasi secara jelas dengan berbagai alasan," ujarnya. "Dengan demikian, tingkat kepatuhan masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhan dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %," lanjut Anwar.

Dari data tersebut, Anwar menilai masih adanya pembangkangan konstitusi. Kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi menurutnya tidak berarti apa-apa. Anwar mengingatkan angka ketidakpatuhan itu harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, putusan konstitusi yang tidak diindahkan akan menjadi awal kehancuran sebuah bangsa.

"Temuan itu bukan saja penting bagi MK, akan tetapi juga patut menjadi perhatian kita bersama. Kepatuhan terhadap putusan, mencerminkan kedewasaan dan kematangan kita sebagai negara yang menghabiskan diri

sebagai negara hukum demokratis, sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum," katanya.

"Jika demikian faktanya, negara hukum yang kita cita-citakan masih menjumpai tantangan berat. Sejarah di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu membuktikan, manakala konstitusi tidak diindahkan, maka menjadi awal runtuhnya sebuah bangsa," tutur Anwar.

Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menguji UU, MK memang memiliki wewenang yang khusus. Setiap putusan MK bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara mengikat artinya putusan itu berlaku bagi para pihak, termasuk masyarakat Indonesia.

Sifat putusan MK yang final dan mengikat juga dapat mendorong proses politik terkait UU yang telah diuji. Salah satunya, revisi UU atau membuat UU baru akibat hukum dari putusan MK yang menyebut UU atau Pasal dalam UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Obesitas Regulasi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan perlunya untuk memperbaiki dan memangkas regulasi-regulasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, saat ini Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi.

"Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hiper-regulasi, obesitas regulasi," katanya.

Jokowi mengatakan karena obesitas regulasi itu, Indonesia kerap terjerat dalam aturan yang dibuat sendiri. Hal itu, menurut dia, menghambat langkah dalam merespons perubahan dunia. "Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjerak dalam keruwetan dan kompleksitas. Mulai dari PP, Perpres, Permen, Perditjen, sampai Perda, harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat," tutur dia.

Karena itu, kata dia, pentingnya omnibus law yang saat ini dikebut oleh pemerintah. Jokowi mengatakan dengan omnibus law itu, maka semua undang-undang yang jumlahnya terlalu banyak dapat disederhanakan dan diseleraskan sehingga tak ada lagi peraturan

yang tumpang tindih.

"Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR. Omnibus law memang belum populer di Indonesia tapi telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti AS. Ini adalah sebuah strategi reformasi regulasi. Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, lebih cepat, responsif menghadapi era kompetisi, era kerja saat ini," kata Jokowi.

Jokowi pun berharap semua pihak dapat mendukung langkah pemerintah itu. Sehingga ke depannya Indonesia dapat bersaing dalam kompetisi dunia. "Dalam kesempatan ini kita mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah dalam visi yang sama menciptakan hukum yang fleksibel, yang sederhana, yang kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial demi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," pungkask dia.

Sementara itu, kinerja MK selama 2019 tercatat ada 122 perkara pengujian UU yang masuk ke MK pada tahun lalu, lebih banyak dibanding 114 perkara pada 2018. Perinciannya, 85 perkara diterima MK pada 2019, sedangkan 37 lainnya melanjutkan dari tahun 2018. Terdapat 149 perkara yang diregistrasi pada 2017 dan 65 yang diterima tahun 2018.

Dari jumlah tersebut, ada 92 perkara yang telah diputus hingga Desember 2019. Sementara 30 perkara lainnya masih dilanjutkan pengujiannya hingga 2020. Adapun, aturan yang paling sering diuji adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni sebanyak 18 kali. Kemudian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sebanyak 9 kali. MK juga melakukan pengujian terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masing-masing diuji sebanyak 4 kali. Pada tahun lalu, MK juga telah memutus satu perkara sengketa kewenangan lembaga negara. MK juga telah menangani 261 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan 1 perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden.(ist,ins)

JUNI, MENTERI ERICK REALISASI HOLDING RS 'PELAT MERAH'



Jakarta- Gebrakan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk menertibkan 'anak cucu' BUMN terus dilakukan. Terbaru, Juni 2020 ini ditargetkan sudah ada holding untuk Rumah Sakit (RS) milik perusahaan 'pelat merah'.

Erick menjelaskan, holding dibentuk karena banyak BUMN yang memiliki bisnis rumah sakit. Padahal, itu bukan inti (core) bisnisnya. "Kita mau holdingkan, ngapain perusahaan-perusahaan yang fokus core bisnisnya bikin rumah sakit, yang ada rumah sakit nggak servis baik," katanya di acara kuliah umum, Jakarta, Selasa (28/1).

"Dengan kita holdingkan rumah sakit, Inshaallah Juni ini jadi holdingnya," tambahnya. Erick mengatakan, holding ini punya peluang yang bagus. Apalagi, ada mitra dari strategis dari Jepang. Lanjutnya, Jepang sendiri membutuhkan 350 ribu suster. Dengan adanya holding diharapkan kebutuhan suster itu bisa dipenuhi dari Indonesia.

"Ini ada kesempatan, apa, kalau kita ada strategic partner dari Jepang, Jepang itu perlu 350 ribu suster. Karena berpartner Jepang harus dong di bawah holding rumah sakit ada sekolah suster atau add value kesehatan servis tapi di-training dari awal Bahasa Jepang, kultur Jepang-nya, supaya ketika berpartner akses 350 ribu suster itu bisa juga buat kita, bukan Filipina lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Erick mengatakan jika bisnis tersebut dikonsolidasikan, omzetnya terbilang fantastis yaitu mencapai Rp 5 triliun per tahun.

"RS BUMN sendiri punya revenue kalau dikonsolidasikan sekitar Rp 5 triliun revenue-nya. (omzet Rp 5 triliun) per tahun, kaget kan? Saya saja kaget," ujar Erick. Menurutnya angka tersebut memiliki potensi yang bagus. Oleh karenanya - BUMN perlu dikelola dengan fokus, bukan dikelola oleh BUMN yang bisnis utamanya bergerak di sektor lain.

"Nah ini kan cukup potensi. Sayang kan bisa difokuskan jadi expertise. Tidak perlu di bawah Pelni, Pertamina, Pelindo. Pelindo

bisnisnya ada yang lebih pasti kok, perkapalan, pelabuhan dan lain-lain kok," tuturnya.

Begitu juga Pertamina yang menurutnya bisa fokus ke bisnis intinya dan tidak lagi memikirkan bisnis nya. "Padahal fokus utamanya Pertamina kan migas. Pertamina punya 25 sumur yang harus dieksplorasi. Lifting sekarang turun. Nah hal-hal ini kita nggak mau auto fokus. Nah saya rasa ini akan jadi konsolidasi yang baik, jadi bisnis yang juga progresif dan bisa bersaing," tambahnya.

Sebelumnya, 24 BUMN yang memiliki

anak atau cucu usaha rumah sakit tersebut sudah digabungkan dalam Holding Rumah Sakit BUMN yang dibentuk oleh Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno pada tahun 2017. Holding tersebut bernama Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Induk IHC yang ditunjuk Rini kala itu adalah anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika). Pertamedika IHC adalah sebuah jaringan pengelolaan rumah sakit terbesar di Indonesia yang mengelola lebih dari 77 rumah sakit dan klinik milik BUMN. (ist,ins)

DERETAN RUMAH SAKIT MILIK BUMN

| BUMN | Rumah Sakit | Lokasi |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| PT Aneka Tambang Tbk | RS Antam Medika | Pulogadung, Jaktim |
| PT Bukit Asam Tbk | RS Bukit Asam Medika | Tanjung Enim, Sumsel |
| PT Pelindo I (Persero) | RS Prima Husada Cipta | Medan, Sumut |
| PT Pelindo II (Persero) | RS Pelabuhan Jakarta | Jakut |
| | RS Pelabuhan Cirebon | Jabar |
| | RS Pelabuhan Palembang | Sumsel |
| | RS Port Medical Center | Jakut |
| | PT Pelindo III (Persero) | RS PHC |
| PT Pelni (Persero) | RS Pelni | Jakbar |
| PT Pertamina (Persero) | RS Pertamina Pusat | Jaksel |
| | RS Pertamina Jaya | Jakpus |
| | RS Pertamina Balikpapan | Kaltim |
| | RS Pertamina Cirebon | Jabar |
| | RS Pertamina Prabumulih | Sumsel |
| | RS Pertamina Tanjung | Kalsel |
| | RS Pertamedika Tarakan | Kalut |
| | RS Pertamina Sorong | Papua Barat |
| | RS Pertamina Pangkalan Brandan | Sumut |
| | RS Pertamina Plaju | Sumsel |
| | RS Pertamina Rantau | Aceh |
| | RS Bintang Amin | Lampung |
| | RS Pertamedika Ummi Rosnati | Aceh |
| | RS Baiturrahim | Jambi |
| | RS Pertamina Balongan | Jabar |
| RS Pertamina Cilacap | Jateng | |
| RS Pertamina Dumai | Riau | |
| PT Petrokimia Gresik | RS Petrokimia Gresik | Jatim |
| PTPN I | RS Cut Meutia | Aceh |
| PTPN II | RS Bangkatan Tanjung Selamat | Tembakau Deli |
| PTPN III: (Persero) | RS Sri Pamela Medika Medan | Sumut |
| PTPN IV | RS Prima Medika Nusantara Medan | Sumut |
| PTPN V | RS Nusalina Medika Pekanbaru | Riau |
| PTPN VIII | RS Agro Medika Nusantara Bandung | Jabar |
| PTPN X | RS Nusantara Medika Utama Jember | Jatim |
| PTPN XI | RS Nusantara Sebelas Medika Surabaya | Jatim |
| PTPN XII | RS Rolas Medika Nusantara Surabaya | Jatim |
| PTPN XIII | RS Kalimantan Medika Nusantara | Pontianak, Kalbar |
| PT Pupuk Kaltim | RS Pupuk Kaltim Bontang | Kaltim |
| | RS Medika Utama Permata Balikpapan | Kaltim |
| | RSPKT Prima Sangatta Kutai Timur | Kaltim |
| PT Pupuk Kujang | RS Pupuk Kujang Cikampek | Jabar |
| PT Pupuk Sriwijaya | RS Pusri Palembang | Sumsel |
| PT Sang Hyang Seri (Persero) | RS Sri Bhakti | Jakarta |
| PT Semen Indonesia (Persero) | RS Semen Gresik | Jatim |
| PT Timah Tbk | RS Bakti Timah | Pangkalpinang |
| | RS Medika Stannia | Bangka Belitung |
| | RSBT Muntok | Bangka Barat |
| | RSBT Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau |